

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangan

Carissa Patricia Hong¹ Devy Yulyana² Rasji³

Jurusan Desain Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: carissa.205220108@stu.untar.ac.id¹ devy.205220069@stu.untar.ac.id²
rasji@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum Indonesia menjadi salah satu penentu penting dalam menilai kualitas demokrasi serta keadilan di negara ini. Kendati Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kokoh yang menjamin HAM, implementasinya masih terkendala oleh sejumlah tantangan yang kompleks. Penelitian ini memiliki fokus utama untuk memahami secara mendalam bagaimana perlindungan HAM dijalankan dalam kerangka hukum Indonesia serta mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui penggunaan bahan hukum dan tinjauan literatur yang komprehensif, ditemukan bahwa walaupun terdapat kerangka hukum yang kuat yang mendukung perlindungan HAM, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut meliputi budaya hukum yang lemah, ketidaksetaraan, diskriminasi, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa solusi telah diusulkan. Di antaranya adalah peningkatan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang HAM, reformasi hukum yang menyeluruh dan terencana, pemberantasan korupsi, penguatan sistem peradilan dengan memastikan independensinya, dan pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan umum dan HAM secara harmonis. Diharapkan, dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia dapat ditingkatkan secara substansial. Hal ini akan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari sebuah sistem hukum yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia secara menyeluruh.

Kata Kunci: HAM, Negara, Implementasi, Tantangan

Abstract

The protection of human rights in the Indonesian legal system is one of the important determinants in assessing the quality of democracy and justice in the country. Although Indonesia has a solid constitutional foundation that guarantees human rights, its implementation is still constrained by several complex challenges. This research has a focus to understand in depth how human rights protection is implemented within the Indonesian legal framework and identify key challenges that need to be overcome to improve their effectiveness. In this study, a descriptive analytical method with a normative juridical approach was used. Using legal materials and a comprehensive literature review, it was found that although there is a strong legal framework that supports the protection of human rights, there are still significant challenges in its implementation. These challenges include a weak legal culture, inequality, discrimination, corruption, and weak law enforcement. To overcome these challenges, several solutions have been proposed. Among them are increasing legal education and public awareness about human rights, comprehensive and planned legal reform, eradicating corruption, strengthening the judicial system by ensuring its independence, and an approach that integrates public interest and human rights harmoniously. It is hoped that by implementing these solutions, human rights protection in the Indonesian legal system can be substantially improved. This will ensure that the human rights of every individual are respected and protected in accordance with the principles enshrined in the constitution. Thus, people can benefit from a legal system that is fair, democratic, and respects human rights.

Keywords: Human Rights, State, Implementation, Challenges



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah aspek yang mendasar dan krusial dalam setiap sistem hukum kenegaraan yang demokratis dan beradab. Hak asasi manusia mencakup seperangkat hak inheren yang melekat pada setiap individu, yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara serta lembaga-lembaga lainnya (Aswandi & Rosiah, 2019). Dalam konteks sistem hukum kenegaraan, perlindungan HAM memegang peranan penting dalam menegakkan supremasi hukum, memastikan kekuasaan negara dibatasi, dan menjamin bahwa prinsip-prinsip keadilan serta kebebasan dihormati. Implementasi perlindungan HAM seringkali menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, egaliter, dan berperikemanusiaan. Namun, implementasi tersebut tidak selalu berjalan mulus dan seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan yang kompleks, baik dari dalam maupun luar sistem hukum. Dalam tinjauan ini, kita akan membahas secara mendalam tentang implementasi perlindungan HAM dalam sistem hukum kenegaraan, termasuk upaya-upaya konkret dalam mewujudkan, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia, serta berbagai tantangan yang muncul dalam proses tersebut.

Implementasi perlindungan HAM dalam sistem hukum kenegaraan memerlukan kerangka kerja yang kuat, termasuk undang-undang, regulasi, dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menegakkan dan mengawasi kepatuhan terhadap standar HAM (Patawari, 2019). Pembentukan kerangka kerja ini seringkali merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan perlindungan HAM yang efektif. Selain itu, dibutuhkan juga komitmen politik dari pemerintah dan dukungan aktif dari masyarakat sipil untuk memastikan implementasi yang sukses. Upaya-upaya konkret dalam mewujudkan perlindungan HAM termasuk dalam berbagai bidang, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas keadilan dan fair trial, hak atas privasi, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya (Marzuki & Riyadi, 2020). Implementasi perlindungan HAM dalam bidang-bidang ini memerlukan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, program-program aksi yang terarah, serta alokasi sumber daya yang memadai.

Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan HAM seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpatuhan terhadap standar HAM oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang (Marzuki & Riyadi, 2020). Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan sumber daya, korupsi, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM. Selain itu, ketegangan antara keamanan dan HAM juga seringkali menjadi kendala dalam implementasi perlindungan HAM, di mana pemerintah seringkali menggunakan alasan keamanan untuk membatasi hak-hak asasi manusia. Selain tantangan internal, implementasi perlindungan HAM juga seringkali dihadapi oleh tekanan eksternal, termasuk dari aktor-aktor internasional dan regional, serta kekuatan ekonomi dan politik yang berkepentingan (Wicaksana, 2020). Hal ini bisa membuat negara-negara tergoda untuk mengorbankan perlindungan HAM demi kepentingan politik dan ekonomi mereka.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya konkret untuk memperkuat perlindungan HAM dalam sistem hukum kenegaraan (Marzuki & Riyadi, 2020). Salah satu langkah yang penting adalah memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga independen yang memiliki mandat untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran HAM, serta memberikan kompensasi kepada korban (Chrisbiantoro, 2023). Selain

itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan HAM. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan kampanye-kampanye sosial yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai HAM dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia (Santoso et al., 2023).

Implementasi perlindungan HAM dalam sistem hukum kenegaraan adalah sebuah perjalanan yang panjang dan kompleks, yang memerlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Namun, dengan upaya yang bersungguh-sungguh, perlindungan HAM yang efektif dapat diwujudkan, sehingga setiap individu dapat hidup dalam martabat, kebebasan, dan keadilan yang layak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem hukum kenegaraan di Indonesia? Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi perlindungan HAM dalam sistem hukum kenegaraan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif-analitis, yang merujuk pada pendekatan untuk menyelidiki kondisi, status sekelompok manusia, obyek, sistem pemikiran, atau peristiwa pada saat ini. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mencerminkan penggunaan bahan hukum dan analisis literatur sebagai kerangka dalam menganalisis permasalahan yang ada (Sugiyono, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Sistem Hukum Kenegaraan di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokratis dengan konstitusi yang menjamin HAM memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak-hak warganya. Meskipun demikian, sejarah Indonesia juga dipenuhi dengan catatan pelanggaran HAM yang serius, terutama selama masa Orde Baru. Konstitusi Indonesia, yang saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diamandemen, menjamin perlindungan HAM dalam berbagai pasalnya. Namun, implementasi perlindungan HAM ini tergantung pada keberadaan kerangka hukum yang kuat dan efektif (Marzuki & Riyadi, 2020). Di Indonesia, kerangka hukum untuk melindungi HAM termasuk berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan, serta lembaga-lembaga yang dibentuk untuk tujuan tersebut, seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Meskipun kerangka hukum telah ada, implementasi perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketidakseimbangan antara teori dan praktik. Meskipun UUD 1945 menjamin HAM, dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan penindakan hukum yang tegas (Saputra & Aprilia, 2023). Lembaga seperti Komnas HAM memegang peran penting dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM. Namun, kekuatan dan independensi lembaga-lembaga semacam ini sering kali dipertanyakan. Misalnya, keputusan Komnas HAM dapat diabaikan oleh pemerintah atau tidak diambil tindakan tegas sebagai hasil dari laporan mereka.

Implementasi perlindungan HAM juga terhambat oleh tantangan dalam aparat penegak hukum (Marzuki & Riyadi, 2020). Baik itu kekurangan sumber daya, kurangnya pelatihan, atau bahkan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pelanggaran HAM itu sendiri. Hal ini menimbulkan masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga penegaknya. Sejumlah kasus khusus menyoroti tantangan dalam implementasi perlindungan HAM di Indonesia. Contohnya termasuk konflik horizontal antara kelompok agama atau etnis, penegakan hak-hak perempuan dan anak-anak, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam konteks pembangunan. Untuk meningkatkan implementasi

perlindungan HAM, reformasi hukum dan perbaikan sistem peradilan menjadi krusial (Anggita & Sembiring, 2024). Hal ini mencakup penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan HAM, peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang rentan, serta penguatan independensi lembaga peradilan. Pendidikan HAM yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka juga sangat penting (Nugroho & Santoso, 2022). Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah yang memasukkan pelajaran tentang HAM, kampanye publik, dan pelatihan untuk aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah.

Peran masyarakat sipil dan aktivis HAM tidak bisa diabaikan dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM (Aswandi & Rosiah, 2019). Mereka sering kali menjadi pihak yang memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan, serta memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak. Penting juga untuk memperhatikan perlindungan HAM dalam konteks global. Indonesia sebagai anggota PBB dan berbagai organisasi regional harus mematuhi standar internasional dalam melindungi HAM. Ini termasuk keterlibatan dalam forum internasional dan implementasi instrumen-instrumen HAM yang telah diratifikasi. Implementasi perlindungan HAM dalam sistem hukum kenegaraan Indonesia adalah tantangan yang kompleks namun sangat penting. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam hal ini. Dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat kerangka hukum, dan memperbaiki sistem peradilan, Indonesia dapat menggarisbawahi komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan standar internasional.

Tantangan Utama dalam Implementasi Perlindungan HAM dalam Sistem Hukum Kenegaraan di Indonesia

Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum kenegaraan Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan menantang. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk memperkuat perlindungan HAM, masih ada tantangan yang signifikan yang menghambat proses ini (Saputra & Aprilia, 2023). Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi perlindungan HAM di Indonesia, serta solusi yang mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut. Menurut Marzuki dan Riyadi (2020) Tantangan Utama dalam Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia:

1. Budaya Hukum yang Lemah: Salah satu tantangan utama adalah budaya hukum yang belum cukup kuat di kalangan masyarakat. Banyak orang masih kurang sadar akan hak-hak mereka dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang HAM.
2. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi: Ketidaksetaraan gender, diskriminasi terhadap minoritas, dan kelompok rentan lainnya masih menjadi masalah serius di Indonesia. Hal ini sering kali mengakibatkan pelanggaran HAM yang tidak diakui atau diabaikan.
3. Korupsi dan Kekuasaan yang Berlebihan: Korupsi di dalam sistem hukum dan pemerintahan dapat menyebabkan penyimpangan dalam penegakan hukum dan pelanggaran HAM yang tidak terungkap.
4. Tingkat Penegakan Hukum yang Rendah: Meskipun ada undang-undang yang melindungi HAM, penegakan hukum sering kali kurang efektif. Faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi petugas hukum, dan intervensi politik dapat menghambat proses ini.
5. Ketidakpastian Hukum: Sistem hukum yang tidak konsisten dan tidak pasti juga merupakan tantangan. Keterlambatan dalam pembuatan keputusan hukum, putusan yang tidak konsisten antara pengadilan, dan ambiguitas dalam interpretasi undang-undang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam perlindungan HAM.

6. Ketegangan antara Kepentingan Negara dan HAM: Terkadang, upaya untuk melindungi keamanan dan stabilitas negara dapat bertentangan dengan hak-hak individu. Hal ini dapat menghasilkan situasi di mana pemerintah merasa perlu untuk membatasi hak-hak tertentu demi kepentingan umum.

Solusi untuk Mengatasi Tantangan:

1. Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat: Penting untuk meningkatkan pendidikan hukum di masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan HAM. Pendidikan tentang hak-hak dasar dan kewajiban hukum harus dimulai sejak dini di sekolah dan terus ditingkatkan melalui kampanye informasi dan sosialisasi.
2. Reformasi Hukum: Diperlukan reformasi hukum yang komprehensif untuk memperkuat perlindungan HAM. Ini meliputi revisi undang-undang yang sudah ada, pembuatan undang-undang baru yang lebih inklusif, dan penegakan hukum yang konsisten dan adil.
3. Pemberantasan Korupsi: Upaya keras harus dilakukan untuk memberantas korupsi di semua tingkatan pemerintahan dan sistem hukum. Hal ini memerlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
4. Penguatan Sistem Peradilan: Diperlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan petugas hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pengadilan juga perlu diberikan otonomi yang lebih besar dan perlindungan terhadap intervensi politik.
5. Konsolidasi Hukum: Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam perlindungan HAM. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik interpretasi hukum dan memperkuat independensi lembaga-lembaga penegak hukum.
6. Pendekatan Terintegrasi untuk Kepentingan Umum dan HAM: Penting untuk mengembangkan pendekatan yang seimbang antara kepentingan negara dan hak-hak individu. Hal ini melibatkan dialog dan konsultasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok terkait untuk mencapai solusi yang menghormati HAM sambil memperhitungkan keamanan dan stabilitas negara.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan solusi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat perlindungan HAM dalam sistem hukum kenegaraannya dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dihormati dan dilindungi dengan baik. Ini bukan hanya penting untuk keadilan dan kesejahteraan individu, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kesadaran akan HAM, dan memastikan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi perlindungan HAM dalam sistem hukum kenegaraan di Indonesia memerlukan sebuah kerangka kerja yang kuat, yang didukung oleh komitmen politik yang serius serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Proses ini melibatkan berbagai upaya untuk memastikan bahwa standar HAM diintegrasikan dalam kebijakan, peraturan, dan praktik hukum di semua level pemerintahan. Upaya-upaya tersebut mencakup reformasi hukum yang bertujuan untuk menyelaraskan perundang-undangan nasional dengan standar HAM internasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghormati dan melindungi HAM, serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang

HAM dianggap krusial dalam mendukung implementasi perlindungan HAM yang efektif. Tantangan utama dalam implementasi perlindungan HAM di Indonesia meliputi berbagai aspek. Pertama, ketidakpatuhan terhadap standar HAM internasional dan nasional, yang sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman atau ketidakbersediaan untuk mengintegrasikan standar tersebut ke dalam praktik hukum dan kebijakan. Kedua, adanya ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan perlindungan HAM, dimana kebijakan keamanan terkadang dilaksanakan dengan mengorbankan hak-hak individu. Ketiga, tekanan eksternal baik dari aspek politik maupun ekonomi yang dapat mempengaruhi komitmen dan kapasitas Indonesia dalam melindungi HAM. Selain itu, tantangan internal seperti budaya hukum yang lemah, ketidaksetaraan dan diskriminasi, korupsi, penegakan hukum yang rendah, dan ketidakpastian hukum juga secara signifikan menghambat upaya perlindungan HAM. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, untuk memastikan bahwa HAM dihormati, dilindungi, dan dipromosikan di Indonesia. Reformasi hukum, pemberantasan korupsi, penguatan sistem peradilan, dan pendidikan serta kesadaran HAM merupakan langkah-langkah penting yang harus terus diperjuangkan untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

Saran yang dapat digunakan untuk implementasi dan tantangan dalam perlindungan HAM di Indonesia:

1. Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk membangun budaya hukum yang kuat dan menghormati HAM.
2. Reformasi Hukum: Melakukan reformasi hukum untuk memastikan bahwa undang-undang dan regulasi mendukung perlindungan HAM dan bebas dari diskriminasi.
3. Pemberantasan Korupsi: Memperkuat upaya pemberantasan korupsi untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.
4. Penguatan Sistem Peradilan: Memperkuat sistem peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan.
5. Konsolidasi Hukum: Melakukan konsolidasi hukum untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memperjelas batasan antara kepentingan negara dan HAM.
6. Pendekatan Terintegrasi: Mengadopsi pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan baik kepentingan umum maupun HAM dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya.
7. Peran Masyarakat Sipil: Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dan aktivis HAM dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan implementasi perlindungan HAM. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat perlindungan HAM dalam sistem hukumnya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang telah bersedia membagikan ilmunya sehingga saya dapat menyusun artikel ini dengan baik dan tepat waktu. Tak luput peranan teman sebaya yang memberikan dukungan dan motivasi terhadap saya sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, S., & Sembiring, T. B. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan dan Prospek di Era Digital. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 256–271
- Aswandi, B., & Rosiah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128– 145.
- Chrisbiantoro. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. *IUS FACTI: Jurnal*

Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 1(2), 156–179.

Marzuki, S., & Riyadi, E. (2020). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Nugroho, T. K., & Santoso, G. (2022). Perlindungan HAM di Indonesia dengan Merujuk pada UUD Negara RI: Studi Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Transformatif, 1(2)*, 73–81.

Patawari. (2019). Standar Hukum Internasional Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pengaruhnya terhadap Hukum Negara Indonesia. *Pleno Jure, 8(1)*, 25–38.

Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Global Citizen, Pengungsian, dan Pelanggaran HAM di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif, 2(1)*, 144–156.

Saputra, I. A., & Aprilia, S. (2023). Relevansi Konstitusi dalam Menjamin dan Menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik, 1(2)*, 14–28.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Wicaksana, I. G. W. (2020). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Politik Domestik dan Tatanan Kawasan*. Surabaya: Airlangga University Press.